

BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum LPD

4.1.1 Sejarah LPD di Bali

Pendirian LPD di Bali pertama kali di prakarsai oleh Gubernur Bali, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra. Pada tahun 1983, pucuk pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi Bali ini merumuskan gagasan untuk membentuk sebuah lembaga keuangan berbasis adat dengan mengadopsi dan mengembangkan konsep *sekaa*, banjar dan desa adat yang telah tumbuh di tengah-tengah masyarakat Bali. Seperti yang diketahui bahwa Bali erat kaitannya dengan adanya organisasi sosial masyarakat berupa *sekaa*. *Sekaa-sekaa* itu di antaranya *Sekaa Manyi* (kelompok pemanen hasil pertanian di sawah), *Sekaa Gong* (kelompok penabuh), *Sekaa Semal* (kelompok pengusir hama tupai) dan lain-lainnya.

Masing-masing kelompok *sekaa* tersebut secara aktif melaksanakan kegiatan bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yakni kegiatan penghimpunan dan peminjaman dana diantara anggota *sekaa*. Aktivitas penghimpunan dana itu ada yang berupa *pepeson* atau *pecingkreman*, baik berupa uang maupun barang yang dilakukan setiap bulan. Hal tersebutlah yang menginspirasi Prof. Dr. Ida Bagus Mantra dalam merumuskan gagasan untuk membentuk sebuah lembaga keuangan yaitu LPD. Dasar hukum pembentukan LPD pada saat itu yaitu Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 972 Tahun 1984, tertanggal 1 November 1984. Sebagai Implementasi dari Kebijakan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali tersebut diatas,

maka secara resmi LPD beroperasi mulai 1 Maret 1985, dimana disetiap Kabupaten didirikan 1 LPD. Selanjutnya LPD diperkuat oleh PERDA Provinsi Bali No. 2 / 1988 hingga PERDA Provinsi Bali No.8/2002 tentang LPD dan diperbaharui lagi dengan PERDA Provinsi Bali No. 3/2007, terakhir diubah dengan PERDA Provinsi Bali No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PERDA Provinsi Bali No.8/2002 tentang LPD.

4.1.2 Visi Misi LPD di Bali

LPD sebagai lembaga keuangan milik Desa Pakraman memiliki pernyataan visi yaitu terwujudnya industri LPD yang sehat, kuat, produktif, berkelanjutan dan dipercaya sebagai lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan Desa Pakraman, serta pelestarian Adat, Budaya dan Agama Hindu di Bali berlandaskan *Tri Hita Karana* dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan bangsa dan menjalankan misi yaitu menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendorong peningkatan kinerja LPD dan pelayanan keuangan yang berkesinambungan kepada warga masyarakat di Desa Pakraman untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dan berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan demi terwujudnya masyarakat Bali yang sejahtera.

4.1.3 Kegiatan LPD

LPD merupakan lembaga keuangan milik desa Pakraman yang melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan desa untuk *Krama* desa, Berikut kegiatan yang dilakukan LPD yaitu :

- 1) Menerima /menghimpun dana dari *Krama* desa dalam bentuk tabungan dan deposito.

- 2) Memberikan pinjaman kepada *Krama* desa.
- 3) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan modal.
- 4) Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD Bali dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

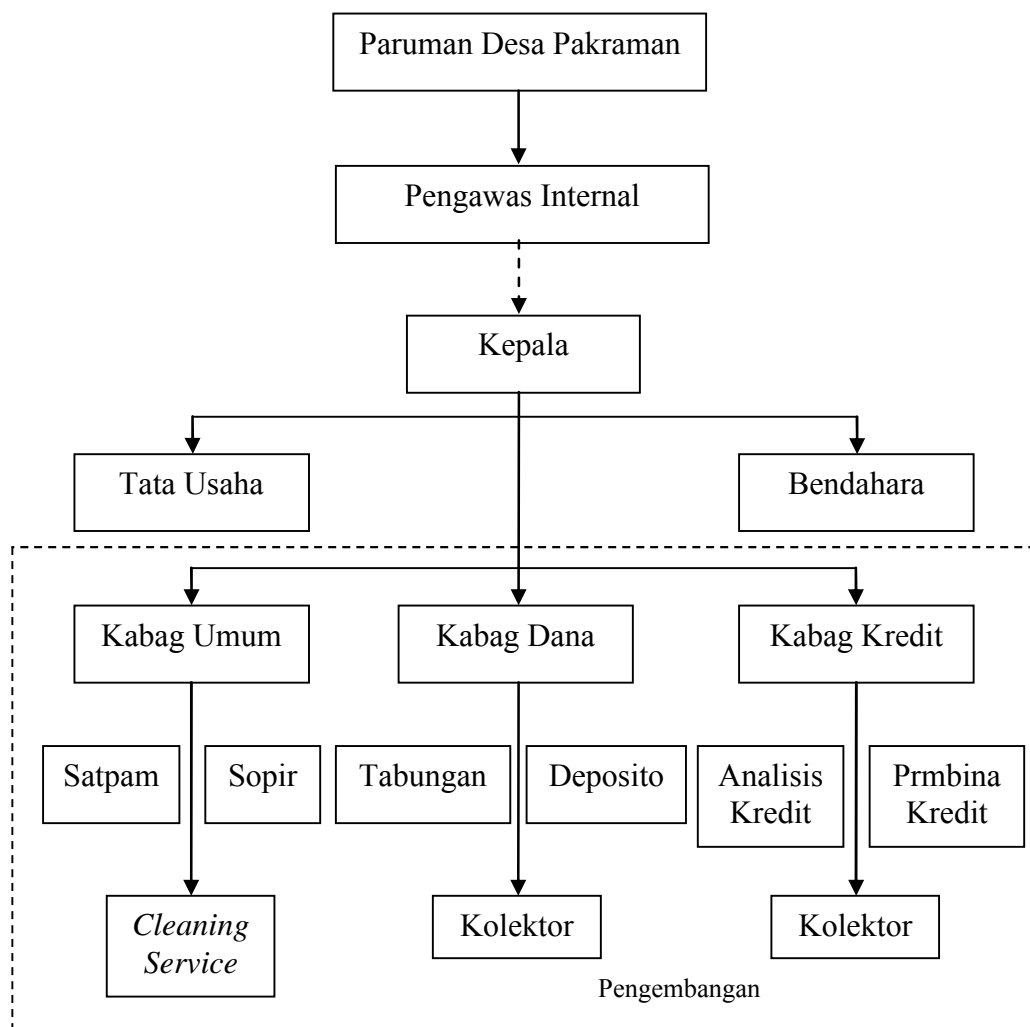
4.1.4 LPD Kecamatan Abiansemal

Kecamatan Abiansemal merupakan salahsatu diantara dua kecamatan yang menjadi pusat pembangunan Badung Utara dengan jumlah penduduk 90.55 jiwa dengan potensi disamping pertanian dalam arti luas juga memiliki obyek wisata sebagai daya dukung yang sangat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini terlihat dari aktivitas masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang tidak terlepas dari dukungan dan kemampuan masyarakat secara ekonomi dan kontribusi yang diberikan oleh lembaga yang dimilikinya berupa LPD dalam rangka menopang dari segi material. Dari 34 desa adat yang ada telah memiliki LPD sebagai lembaga keuangan yang dimiliki desa adat (pakraman) telah dapat menunjukan jati dirinya sebagai pelaba baru yang dapat memberikan manfaat secara signifikan walaupun belum maksimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Keadaan tersebut perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius terutama bagi pemiliknya sehingga perkembangan LPD terus mengalami peningkatan.

4.1.5 Struktur Organisasi LPD

Struktur organisasi LPD sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagai berikut.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi LPD



Sumber: PERDA Prov. Bali No. 4 Tahun 2012

Keterangan :

————— : Garis wewenang dan tanggungjawab

- - - - - : Garis pengawasan

4.2 Data Penelitian

4.2.1 Deskripsi Responden

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 34 sampel yang merupakan seluruh LPD yang ada di Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung. Setiap LPD diberikan masing-masing satu kuesioner yang diisi oleh masing-masing ketua LPD yang merupakan responden penelitian. Ketua LPD dipilih sebagai responden penelitian dikarenakan ketua LPD yang paling bertanggungjawab atas pengelolaan LPD. Pengiriman kuesioner dilakukan dengan cara datang dan memberikannya langsung ke 34 LPD Se-Kecamatan Abiansema. Berikut adalah rincian mengenai pengiriman dan pengembalian kuesioner yang disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
Kuesioner dikirim	34	100
Tidak kembali	0	0
Total kembali	34	100
Kuesioner tidak lengkap	0	0
Kuesioner yang digunakan	34	100
Tingkat Pengembalian (<i>respon rate</i>)	$(34/34) \times 100\% = 100\%$	

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa dari 34 kuesioner yang dikirim, seluruhnya telah kembali dan bisa digunakan dalam penelitian ini sehingga presentase pengembaliannya 100%. Dalam penelitian ini responden penelitian dibagi kedalam beberapa karakteristik, mulai dari jenis kelamin, usia serta tingkat pendidikan. Berikut merupakan data mengenai karakteristik responden penelitian yang termuat dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Penelitian

Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	24	71%
Perempuan	10	29%
Jumlah	34	100%
Usia		
21-30 Tahun	1	3%
31-40 Tahun	7	20%
41-50 Tahun	19	56%
51-60 Tahun	5	15%
≥ 60 Tahun	2	6%
Jumlah	34	100%
Pendidikan Terakhir		
SMA/SMK	17	50%
Diploma	2	6%
Sarjana	15	44%
Pasca Sarjana	0	0%
Jumlah	34	100%

Sumber : Data Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat jelaskan uraian karakteristik responden sebagai berikut.

- 1) Jenis kelamin digunakan untuk mengetahui proporsi responden laki-laki dan perempuan pada LPD Se-Kecamatan Abiansemal. Responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 24 orang (71%), dan responden yang berjenis kelamin wanita 10 orang (29%).
- 2) Usia digunakan untuk mengetahui rentang usia responden penelitian pada LPD Se-Kecamatan Abiansemal. Sebanyak 1 orang responden dengan usia 21-30 tahun, 7 orang dengan usia 31-40 tahun, 19 orang dengan usia 41-50 tahun, 5 orang usia 51-60 tahun, dan 2 orang dengan usia lebih dari 60 tahun.
- 3) Tingkat pendidikan digunakan untuk mengetahui pendidikan terakhir responden penelitian yang ada di LPD Se-Kecamatan Abiansemal. Sebanyak

17 orang pendidikan terakhirnya SMA/SMK, 2 orang pendidikan terakhirnya diploma, 15 orang pendidikan terakhirnya sarjana, serta tidak ada responden yang pendidikan terakhirnya pasca sarjana.

4.3 Hasil Uji Instrumen

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas konstruksi dapat dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen dalam suatu faktor, dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Bila korelasi tiap faktor (*pearson correlation*) tersebut positif dan besarnya $> 0,3$ maka faktor tersebut merupakan konstruk yang kuat sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik. Berikut hasil uji validitas yang termuat dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Kode Instrumen	Nilai <i>Pearson Correlations</i>	Keterangan
1	Transparansi (X_1)	$X_{1,1}$	0,929	Valid
		$X_{1,2}$	0,895	Valid
		$X_{1,3}$	0,933	Valid
2	Akuntabilitas (X_2)	$X_{2,1}$	0,948	Valid
		$X_{2,2}$	0,909	Valid
		$X_{2,3}$	0,962	Valid
3	Responsibilitas (X_3)	$X_{3,1}$	0,898	Valid
		$X_{3,2}$	0,882	Valid
		$X_{3,3}$	0,934	Valid
4	Independensi (X_4)	$X_{4,1}$	0,951	Valid
		$X_{4,2}$	0,938	Valid
5	Kewajaran (X_5)	$X_{5,1}$	0,950	Valid
		$X_{5,2}$	0,927	Valid
		$X_{5,3}$	0,952	Valid
6	Budaya <i>Tri Hita Karana</i> (X_6)	$X_{6,1}$	0,846	Valid
		$X_{6,2}$	0,905	Valid

	X _{6.3}	0,937	Valid
	X _{6.4}	0,923	Valid
	X _{6.5}	0,864	Valid
	X _{6.6}	0,892	Valid
	X _{6.7}	0,949	Valid
	X _{6.8}	0,842	Valid
	X _{6.9}	0,917	Valid
	X _{6.10}	0,941	Valid
	X _{6.11}	0,888	Valid
	X _{6.12}	0,928	Valid
	X _{6.13}	0,879	Valid

Sumber : Lampiran 4, Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat hasil korelasi skor faktor dengan skor total (*pearson correlation*) bernilai positif > 0.3 , sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan untuk penelitian ini memiliki validitas yang baik.

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas menggunakan fasilitas uji statistik *Cronbach Alpha* (α) yang tersedia dalam aplikasi *Statistic Package of Social Science* (SPSS). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan/pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* (α) $> 0,70$ (Ghozali, 2013:47-48). Berikut hasil uji reliabilitas yang termuat dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
1	Transparansi (X ₁)	0,906	Reliabel
2	Akuntabilitas (X ₂)	0,933	Reliabel
3	Responsibilitas (X ₃)	0,892	Reliabel
4	Independensi (X ₄)	0,877	Reliabel
5	Kewajaran (X ₅)	0,937	Reliabel
6	Budaya Tri Hita Karana (X ₆)	0,980	Reliabel

Sumber: Lampiran 5, Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dapat dilihat semua nilai *Cronbach Alpha* (α) tiap variabel sebesar $> 0,70$, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini memiliki konstruk atau variabel yang reliabel atau handal.

4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi tentang karakteristik variabel penelitian, antara lain nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Data yang dianalisis yaitu prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari transparansi (X_1), akuntabilitas (X_2), responsibilitas (X_3), independensi (X_4), dan kewajaran (X_5) serta budaya *tri hita karana* (X_6). Hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Y	34	0,69	5,16	3,0900	1,28833
X1	34	3,00	12,20	9,4944	2,75714
X2	34	3,00	12,10	9,5109	2,81762
X3	34	4,07	12,46	10,1432	2,71864
X4	34	2,00	8,16	6,6479	1,88957
X5	34	3,00	11,48	9,1282	2,82985
X6	34	17,25	53,35	41,4944	11,71114
Valid N (listwise)	34				

Sumber : Lampiran 6, Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, dapat dilihat hasil uji statistik deskriptif menghasilkan nilai-nilai meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dengan jumlah 34 kasus. Misalkan, untuk variabel transparansi (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 3,00, nilai maksimum 12,20, rata-rata penerapan

variabel 9,4944 dengan penyimpangan nilai variabel terhadap nilai rata-ratanya yang ditunjukkan melalui standar deviasi yaitu sebesar 2,75714.

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Hasil Uji Normalitas

Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual dalam penelitian ini adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Apabila *Asymp. Sig (2-tailed)* > α (0,05) maka dikatakan data terdistribusi normal. Berikut adalah hasil uji normalitas yang termuat dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		34
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	0,59386698
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,119
	<i>Positive</i>	0,080
	<i>Negative</i>	-0,119
<i>Test Statistic</i>		0,119
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,200 ^{c,d}

Sumber : Lampiran 7, Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas menunjukan hasil uji normalitas dengan koefisien *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar $0,2 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.5.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka

dikatakan tidak ada multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas akan disajikan dalam Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Model</i>		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	X1	0,361	2,774
	X2	0,433	2,312
	X3	0,830	1,205
	X4	0,727	1,376
	X5	0,774	1,293
	X6	0,409	2,444

Sumber : Lampiran 8, Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* ≥ 0.10 dan nilai *VIF* < 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dalam peneltitian ini.

4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas digunakan metode *Glejer*. Apabila probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% (0,05), maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan dalam Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,651	0,333		1,954	0,061
X1	0,030	0,036	0,258	0,835	0,411
X2	-0,034	0,032	-0,300	-1,062	0,297
X3	-0,009	0,024	-0,075	-0,369	0,715
X4	0,017	0,037	0,098	0,452	0,655
X5	-0,018	0,024	-0,158	-0,749	0,460
X6	0,001	0,008	0,020	0,068	0,946

Sumber : Lampiran 9, Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa nilai Sig. semua variabel independen $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

4.6 Hasil Uji *Goodness of Fit*

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*-nya. Secara statistik dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (R^2), nilai statistik F, dan nilai statistik t (Ghozali ,2013:97).

4.6.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel bebas mampu menjelaskan perubahan variabel terikatnya dapat dilihat pada nilai koefisien *adjusted R^2* yang tertera pada Tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,887 ^a	0,788	0,740	0,65654

Sumber: Lampiran 10, Data diolah, 2016

Berdasarkan hasil output analisis uji koefisien determinasi yang dinyatakan dalam Tabel 4.9 diatas, dapat dilihat nilai *Adjusted R²* yaitu sebesar 0,74, hal ini berarti 74% variasi kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran serta budaya *tri hita karana*. Sedangkan sisanya sebesar 26% dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

4.6.2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji statistik F)

Uji F digunakan untuk menunjukan semua variabel independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Apabila dari uji F didapat probabilitas lebih kecil dari 0.05 berarti secara bersama-sama/simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Hasil uji F penelitian ini disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	43,135	6	7,189	16,678	0,000 ^b
	Residual	11,638	27	0,431		
	Total	54,774	33			

Sumber: Lampiran 10, Data diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 4.10 didapat bahwa hasil nilai F sebesar 16,678 dengan probabilitas 0,000. karena probabilitas < 0,05 maka model regresi dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau dapat dikatakan bahwa variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat.

4.7 Hasil Pengujian Hipotesis

4.7.1 Interpretasi Persamaan Regresi Linier Berganda

Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda digunakan untuk menemukan persamaan dalam penelitian yang dilakukan, yang dapat digunakan untuk menentukan model penelitian dan menjelaskan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.11 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t)

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-0,561	0,635		-0,883	0,385
X1	0,177	0,069	0,378	2,560	0,016
X2	0,144	0,062	0,315	2,336	0,027
X3	-0,057	0,046	-0,120	-1,228	0,230
X4	-0,074	0,071	-0,109	-1,043	0,306
X5	0,018	0,046	0,040	0,394	0,696
X6	0,036	0,015	0,329	2,375	0,025

Sumber: Lampiran 10, Data diolah, 2016

Adapun persamaan regresi linier berganda yang dapat dibentuk berdasarkan Tabel 4.11 yaitu :

$$Y = -0,61 + 0,177 X_1 + 0,144 X_2 - 0,057 X_3 - 0,074 X_4 + 0,018 X_5 + 0,036 X_6 \dots (3)$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Nilai konstanta -0,61 menunjukan jika variabel bebas X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , dan X_6 diabaikan atau diasumsikan 0 maka nilai kinerja keuangan (Y) adalah -0,61 artinya tanpa atau sebelum adanya variabel bebas X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , dan X_6 dalam LPD maka kinerja keuangan LPD akan menurun sebesar 0,61.
- 2) Nilai koefisien transparansi (X_1) sebesar +0,177 dapat diartikan apabila variabel transparansi meningkat sebesar satu-satuan, maka akan diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan (Y) sebesar 0,177.
- 3) Nilai koefisien akuntabilitas (X_2) sebesar +0,144 dapat diartikan apabila variabel akuntabilitas meningkat sebesar satu-satuan, maka akan diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan (Y) sebesar 0,144
- 4) Nilai koefisien responsibilitas (X_3) sebesar -0,057 dapat diartikan apabila variabel responsibilitas meningkat sebesar satu-satuan, maka akan diikuti dengan penurunan kinerja keuangan (Y) sebesar 0,057.
- 5) Nilai koefisien independensi (X_4) sebesar -0,074 dapat diartikan apabila variabel independensi meningkat sebesar satu-satuan, maka akan diikuti dengan penurunan kinerja keuangan (Y) sebesar 0,074.
- 6) Nilai koefisien kewajaran (X_5) sebesar +0,018 dapat diartikan apabila variabel kewajaran meningkat sebesar satu-satuan, maka akan diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan (Y) sebesar 0,018.
- 7) Nilai koefisien budaya *tri hita karana* (X_6) sebesar +0,036 dapat diartikan apabila variabel budaya *tri hita kirana* meningkat sebesar satu-satuan,

maka akan diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan (Y) sebesar 0,036.

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian

4.8.1 Pengaruh Transparansi pada Kinerja Keuangan

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yaitu transparansi berpengaruh positif pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang artinya apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip transparansi seperti menyajikan laporan keuangan secara terbuka, proses pengambilan keputusan yang transparan melalui rapat, dan adanya keterbukaan mengenai informasi maka akan mampu meningkatkan kinerja keuangan LPD.

Berdasarkan pengujian hipotesis pada Tabel 4.11 variabel transparansi memiliki koefisien regresi sebesar +0,177 dengan nilai signifikansi sebesar 0,016 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa variabel transparansi positif dan berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Sehingga H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa apabila prinsip transparansi dilakukan dengan baik, maka akan berimplikasi pada semakin baik pula kinerja keuangan LPD. Hasil tersebut juga mendukung penelitian yang dilakukan Rahmatika (2015); Frediawan (2008); Ristifani (2009); Hindistari (2016) yang menyatakan penerapan prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja.

4.8.2 Pengaruh Akuntabilitas pada Kinerja Keuangan

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas berpengaruh positif pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

yang artinya apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip akuntabilitas seperti adanya kejelasan pertanggungjawaban sesuai struktur LPD, pemahaman yang baik mengenai visi, misi, dan tujuan dan target operasional LPD maka akan mampu meningkatkan kinerja keuangan LPD.

Berdasarkan pengujian hipotesis pada Tabel 4.11 variabel akuntabilitas memiliki koefisien regresi sebesar +0,144 dengan nilai signifikansi sebesar 0,027 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas positif dan berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Sehingga H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa apabila prinsip akuntabilitas dilakukan dengan baik, maka akan semakin tinggi pula kinerja keuangan LPD. Hasil tersebut juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Frediawan (2008); Ristifani (2009); Rahmatika (2015); Hindistari (2016); Jayanti (2016) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja.

4.8.3 Pengaruh Responsibilitas pada Kinerja Keuangan

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini yaitu responsibilitas berpengaruh positif pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang artinya apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip responsibilitas seperti mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan LPD, kepedulian terhadap masyarakat serta kesesuaian terhadap prosedur dan sistem yang ditetapkan maka akan mampu meningkatkan kinerja keuangan LPD.

Berdasarkan pengujian hipotesis pada Tabel 4.11 variabel responsibilitas memiliki koefisien regresi sebesar -0,057 dengan nilai signifikansi sebesar 0,230

yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa variabel tanggung jawab negatif dan tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan LPD sehingga rumusan hipotesis H₃ ditolak. Hal ini dimungkinkan terjadi karena penerapan prinsip tanggung jawab pada LPD yang berkaitan dengan pemahaman dan taat terhadap seluruh peraturan perundangan dan peraturan LPD yang berlaku masih kurang. Hal ini mungkin terjadi akibat ketidakjelasan dasar hukum yang dipakai sebagai pedoman dalam pengelolaan LPD yang merupakan konsekuensi atas berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengakui dan melindungi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali sebagai lembaga keuangan bersifat khusus yang diatur hukum adat. Menurut pakar hukum Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya menjelaskan pengakuan LPD sebagai lembaga keuangan yang bersifat khusus dan diatur hukum adat telah menjelaskan bahwa pemerintah tidak lagi berhak mengintervensi atau mengatur urusan teknik maupun operasional pengelolaan LPD sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah yang mengatur tentang LPD yaitu PERDA Prov. Bali No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan daerah provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sudah sepatutnya diganti dengan perda yang baru (Admin; 2016; *UU LKM Berlaku, Perda LPD Otomatis Gugur*; <http://www.lpdkedonganan.com/2016/08/bukan-revisi-tapi-perda-lpd-mesti.html>; diakses tanggal 13 Januari 2017). Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan LPD belum bisa dilakukan dengan baik.

Hasil tersebut mendukung hasil penelitian terdahulu oleh Mappaselle (2013); Irwondy (2014) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial penerapan prinsip responsibilitas terhadap kinerja perusahaan. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Frediawan (2008); Ristifani (2009); Rahmatika (2015); Hindistari (2016) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja.

4.8.4 Pengaruh Independensi pada Kinerja Keuangan

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini yaitu independensi berpengaruh positif pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang artinya apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip independensi seperti ketua dan pengelola LPD tidak boleh saling mencampuri dalam pelaksanaan tugas, hak, dan kewajiban masing-masing, serta tidak adanya intervensi dari pihak yang dapat merugikan LPD maka akan mampu meningkatkan kinerja keuangan LPD.

Berdasarkan pengujian hipotesis pada Tabel 4.11 variabel independensi memiliki koefisien regresi sebesar -0,074 dengan nilai signifikansi sebesar 0,306 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa variabel independensi negatif dan tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan LPD sehingga rumusan hipotesis H_4 ditolak. Hal ini dimungkinkan terjadi karena dalam proses pengambilan keputusan, ketua LPD belum dapat mengambil keputusan secara objektif atau bebas dari kepentingan berbagai pihak yang dapat merugikan LPD, selain itu ketua LPD juga belum dapat menghindari adanya dominasi oleh pihak lain, mengingat peran LPD yang sangat strategis, maka tidak

heran banyak orang ingin ambil bagian dalam pengelolaan LPD tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip independensi dalam pengelolaan LPD belum dapat dilakukan dengan baik.

Hasil tersebut mendukung hasil penelitian terdahulu oleh Mappaselle (2013); Irwondy (2014) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial penerapan prinsip independensi terhadap kinerja perusahaan. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Frediawan (2008); Ristifani (2009); Rahmatika (2015); Hindistari (2016) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip independensi berpengaruh positif terhadap kinerja.

4.8.5 Pengaruh Kewajaran pada Kinerja Keuangan

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini yaitu kewajaran berpengaruh positif pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang artinya apabila dalam pengelolaan LPD menerapkan prinsip kewajaran seperti memperlakukan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan LPD secara adil, tidak memihak, setara dan wajar, baik itu untuk para anggota maupun kepada *krama* desa maka akan mampu meningkatkan kinerja keuangan LPD.

Berdasarkan pengujian hipotesis pada Tabel 4.11 variabel kewajaran memiliki koefisien regresi sebesar +0,018 dengan nilai signifikansi sebesar 0,696 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa variabel kewajaran positif dan tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan LPD sehingga rumusan hipotesis H₅ ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip kewajaran pada LPD dapat dikatakan cukup baik. Kewajaran yang dimaksud yaitu memberikan kesempatan yang sama para *krama Desa*/ anggota

LPD untuk memberikan masukan dan pendapat pada LPD, memberikan perlakuan adil kepada semua anggota serta memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan LPD bagi *krama Desa*. Tetapi walaupun penerapan prinsip ini dapat dikatakan cukup baik, nyatanya masih belum dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan LPD, sehingga perlu dilakukan peningkatan dalam proses penerapan prinsip ini secara berkelanjutan, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan LPD.

Hasil tersebut mendukung hasil penelitian terdahulu oleh Irwondy (2014) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial penerapan prinsip kewajaran terhadap kinerja perusahaan. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Frediawan (2008); Ristifani (2009); Rahmatika (2015); Hindistari (2016); Jayanti (2016) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja.

4.8.6 Pengaruh Budaya *Tri Hita Karana* pada Kinerja Keuangan

Hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini yaitu budaya *tri hita karana* berpengaruh positif pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang artinya apabila dalam pengelolaan LPD didasarkan dengan penerapan nilai-nilai budaya *tri hita karana* yang mencakup aspek integritas yaitu bertakwa, penuh dedikasi, dan kejujuran, aspek etos kerja yaitu kreativitas, bekerja keras dalam bekerja, menghargai waktu, bekerja sama secara harmonis, setia kepada janji, bertindak efisien, penuh prakarsa, serta aspek kelestarian lingkungan yaitu membangun, memelihara, dan mengamankan maka akan mampu meningkatkan kinerja keuangan LPD.

Berdasarkan pengujian hipotesis pada Tabel 4.11 variabel budaya *THK* memiliki koefisien regresi sebesar +0,036 dengan nilai signifikansi sebesar 0,025 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa variabel budaya *THK* positif dan berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Sehingga H_6 diterima. Hal ini berarti dengan menerapkan budaya *Tri Hita Karana* sebagai budaya organisasi LPD maka akan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja keuangan LPD. Hasil tersebut juga konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gunawan (2009); Saputra (2012); Adiputra (2014); Surya (2014) yang mendapati hasil bahwa budaya *tri hita karana* yang diadopsi sebagai budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.